

Nomor : 001/HK.01.00/K.SN-22/02/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 18 Februari 2026

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Bahwa sehubungan dengan banyaknya data kematian yang ada di Kota Makassar dan belum memiliki the jure sesuai dengan persyaratan maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Mengimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk membuat tabulasi data kematian yang ada dan belum

memiliki the jure untuk kemudian dijadikan data Bersama untuk mengontrol warga masyarakat yang telah melaporkan ke disdukcail untuk memperoleh Akta kematian agar adanya keseragaman data terkait data kematian.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

Ketua,



Dr. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).
- 2. Arsip.